

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* DALAM  
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN  
TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DI BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**



**Nama : Melda Novita**

**NIM : 22 2011 042**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2017**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* DALAM  
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN  
TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DI BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Melda Novita**

**NIM : 22 2011 042**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2017**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melda Novita

Nim : 22 2011 042

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, 2017  
Yang membuat pernyataan,



Melda Novita

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : Analisis Penerapan Sistem *E-Filling* Dalam  
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib  
Pajak Orang Pribadi di Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan

**Nama** : Melda Novita

**Nim** : 22 2011 042

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis

**Program Studi** : Akuntansi

**Mata Kuliah Pokok** : Perpajakan

**Diterima dan Disahkan  
Pada tanggal,**

**Pembimbing**

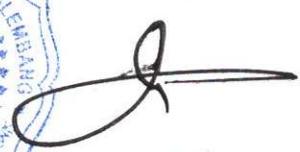


**(M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si)**  
**NIDN/NBM: 0204076802/843951**

**Mengetahui**

**Dekan**

**u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



**(Betri Sirajudin, S.E, M.Si, Ak., CA)**

**NIDN/NBM : 0216106902/944806**

## **PERSEMBAHAN DAN MOTTO**

### **Motto :**

**Jika anda jatuh ribuan kali maka bangkitlah jutaan kali, karena anda tidak tahu seberapa dekat anda dengan kesuksesan**

**(Melda Novita)**

**Skripsi ini aku persembahkan kepada :**

- **Ibu Maryani (Almh) dan Ayah Umar**
- **Mama (Yanto/ Leo)**
- **Kakak (Aidil, Benny, Usyak, Andre)**
- **Keluarga Besar**
- **Pembimbing (M.Orba Kurniawan S.E, S.H, M.Si)**
- **Sahabat Seperjuangan**
- **Almamaterku**



## PRAKATA

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Persepsi Pegawai Dalam Menerapkan Sistem *E-Filing* Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan) .

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku (Maryani dan Umar) dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahannya serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.

3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA dan Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Wakil Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan beserta Staf dan karyawan-karyawati Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa materil dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Palembang, Maret 2017  
Penulis

**Melda Novita**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN DEPAN/COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	vi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	12
1. Pajak .....	12

a. Pengertian Pajak .....	12
b. Fungsi Pajak .....	14
c. Syarat Pemungutan Pajak .....	14
d. Pengelompokan Pajak .....	16
e. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	18
f. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak .....	20
g. Hambatan Pemungutan Pajak .....	21
2. Penerapan Sistem <i>E-filling</i> .....	22
a. Pengertian <i>E-filling</i> .....	22
b. Sistem <i>E-filling</i> .....	26
c. Kemudahan menggunakan <i>E-filling</i> .....	27
d. Kebermanfaatan menggunakan <i>E-filling</i> .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Operasionalisasi Variabel.....	32
D. Populasi dan sampel.....	32
E. Data Yang Diperlukan.....	33
F. Metode Pengumpulan Data.....	34
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	38
--------------------------	----

B. Pembahasan .....	61
<b>BAB V    SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya .....	11
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	32
Tabel IV.1 Data Kuesioner.....	56
Tabel IV.2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Tabel IV.3 Data Pegawai Berdasarkan Umur.....	57
Tabel IV.4 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	58
Tabel IV.5 Data Pegawai Berdasarkan Lama Bekerja .....	58
Tabel IV.6 Hasil pengujian validitas variabel kebermanfaatan.....	60
Tabel IV.7 Hasil pengujian validitas variabel kemudahan.....	60
Tabel IV.8 Rekapitulasi Jawaban Kebermanfaatan <i>e-filling</i> .....	62
Tabel IV.9 Rekapitulasi Jawaban Kemudahan <i>e-filling</i> .....	72

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar IV.1 Struktur Organsiasi .....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Fotokopi Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 2 : Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghapal Al-Qur'an
- Lampiran 4 : Fotokopi Sertifikat TOEFL
- Lampiran 5 : Fotokopi Sertifikat KKN
- Lampiran 6 : Biodata Penulis

## ABSTRAK

**Melda Novita / 22.2011.042 / 2017 / Analisis Penerapan sistem *E-filling* dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan / Perpajakan.**

Rumus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sistem *E-filling* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan nya untuk mengetahui penerapan sistem *E-filling* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, bagi BPBD Provinsi Sumatera Selatan dan bagi almamater.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, dengan tempat penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner, wawancara dan Dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem *E-filling* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-filling* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah berjalan dengan cukup baik.

**Kata kunci : Sistem *E-Filling*, Surat Pemberitahuan Tahunan**

## ABSTRACT

**Melda Novita / 22.2011.042 / 2017 / Analysis application of the system e-filling in to submit a letter of notice annual taxpayers individual in the regional disaster management board the province of south sumatra / Taxation.**

*The formula problem in research is how application of the system e-filling in to submit a letter of notice annual taxpayers individual in the regional disaster management board the province of south sumatra. The purpose of his to know application of the system e-filling in to submit a letter. This research benefit writer, for a regional disaster management board the province of south sumatra, and for alma mater.*

*This study was a descriptive study where the research in the regional disaster management board the province of south sumatra. The data used were primary and secondary data. The techniques of collecting the data were questionnaires, interviews and documentation, and for the analyzing the data was qualitative analysis which was conducted to determine to know application of the system e-filling in to submit a letter.*

*The results of this study showed that to know application of the system e-filling in to submit a letter has been running with good enough.*

**Key words:** *System E-filing, the letter of annual*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar. Di Indonesia salah satu sumber terbesar pemasukan Negara adalah dari sektor pajak. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro dalam buku Mardiasmo (2013: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mardiasmo (2013: 7) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu sebagai berikut : *Official Assessment system*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Di Indonesia system perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain,

membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Agar sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataannya kepatuhan wajib pajak atau keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah.

Salah satu sektor umum dari pemerintah Indonesia yang memiliki peran vital khususnya menyangkut sumber penerimaan negara adalah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Abdul Rahman (2010: 210) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada

aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Dalam rangka reformasi untuk meningkatkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak melakukan sebuah terobosan guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, yaitu dengan penerapan ICT (*Information, Communication, Technology*).

Situs Direktorat Jenderal Pajak menuliskan tentang fakta mengenai jumlah wajib pajak yang patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya ternyata masih rendah. Hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensiasati rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya adalah dengan membuat biaya kepatuhan menjadi rendah. Salah satu cara yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan minat dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya adalah meluncurkan produk *e-Filing* atau *electronic filing system* melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. *E-filing* yaitu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Penggunaan sistem tersebut dikatakan baik apabila persepsi pengguna merasakan manfaat dan kemudahan dari penerapan sistem tersebut.

Penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *E-filing* diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ./2009 Tentang Tata Cara

Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 30 Desember 2011. Secara khusus, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *E-filing* pada situs Direktorat Jenderal Pajak diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *E-filing* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) tanggal 23 Desember 2011.

Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun *budgeting*. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Setiap pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana harus menyampaikan SPT tahunan sebagai wajib pajak.

Berdasarkan survei pendahuluan jumlah pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu sebanyak 74 pegawai. Wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan dapat menggunakan sistem *e-Filling*. Dengan adanya sistem *e-Filling* ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan

melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah seluruhnya menggunakan sistem *e-Filing*, yaitu berjumlah 74 pegawai yang sudah menerapkan sistem tersebut. Dalam praktiknya sistem tersebut bukan merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan. Untuk dapat menggunakan *e-Filing* wajib pajak harus mengajukan permohonan ke kantor pajak dan akan diberikan e-FIN yaitu semacam identitas online. Untuk memperoleh e-FIN wajib pajak perlu melayangkan permohonan yang dilengkapi dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SKT dan surat pengukuhan PKP (untuk SPT PPN). Selain e-FIN, wajib pajak juga mendapatkan sertifikat digital dari website perusahaan penyedia jasa aplikasi yang berfungsi sebagai pengaman data SPT. Kelebihan penggunaan sistem *e-filing* pegawai lebih mudah dan cepat dalam melaporkan SPT, namun terdapat kekurangan dari beberapa pegawai dalam menerapkan sistem tersebut karena menurut mereka terlalu banyak syarat dan kurang memahami sistem tersebut karena dilakukan secara online, sehingga masih memerlukan waktu dalam melakukan pelaporan SPT dengan menggunakan sistem tersebut.

Penelitian ini akan menghubungkan kemudahan *e-Filing* dan kebermanfaatan *e-Filing* dalam menyampaikan SPT Tahunan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem *E-Filling* Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang**

**Pribadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah penerapan sistem *e-filling* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem *e-filling* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

### **1. Bagi Penulis**

Diharapkan menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam penerapan sistem *e-filling* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna sehingga dapat bermanfaat atau memberikan masukan yang positif tentang penerapan sistem *e-filing* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Arsyie (2014) dengan judul Analisis Penerapan *E-Filing* Dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT XYZ (Studi Kasus Pada PT XYZ). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan *e-filing* dalam praktik penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) pada PT XYZ?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *e-filing* dalam praktik penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) pada PT XYZ. Peran PT XYZ dalam memfasilitasi karyawan untuk menyampaikan SPT dilakukan dengan cara menyediakan bukti potong 1721-A1 beserta *electronic filing identification number (e-fin)* yang diperoleh secara kolektif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menganalisis kebijakan PT XYZ menerapkan *e-filing* untuk karyawannya melalui data primer berupa wawancara dengan bagian *Human Resources (HR)* dan juga karyawan setempat. Selain itu, untuk mengukur persepsi karyawan PT XYZ selaku objek penelitian, peneliti menggunakan

kuesioner untuk mengumpulkan data. Kuesioner disebarkan dengan metode *convenience* atau *accidental* kepada siapa saja yang peneliti temui yang berstatus sebagai karyawan terdaftar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* menurut persepsi karyawan PT XYZ dinilai bermanfaat dalam mempermudah penyampaian SPT. Selain itu, dari segi tampilan *e-filing* cukup mudah dipahami dan dipelajari dan diharapkan untuk terus ditingkatkan di tahun pajak berikutnya terutama dalam hal sosialisasi tata cara penggunaan.

Penelitian sebelumnya dilakukan juga oleh Sari (2015) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten.

Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Klaten dengan metode *sampling incidental*. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filing* di KPP Pratama Klaten. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 103

responden. Kuesioner di uji valditas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji linearitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan *Moderated Regression Analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,358, yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 35,8%.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan Dwi dan Fany (2015) dengan judul Analisis Penerapan Aplikasi *E-Filing* Dalam Melaporkan Spt Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perbedaan pelaporan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-filing dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi?. Tujuan penelitian, ialah mengetahui perbedaan pelaporan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-filing dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Objek penelitian ini adalah wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP

Pratama Penjaringan Jakarta Utara Tahun 2013 yang berjumlah 48.640 dan Tahun 2014 yang berjumlah 52.742. Analisis yang dilakukan yaitu untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan dalam pelaporan secara manual dan e-filing dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah sistem e-filing tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Persentase Pelaporan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2013 secara manual 28,85% pada tahun 2014 sebesar 31,60%, sedangkan secara e-filing tahun 2013 0,10% pada tahun 2014 sebesar 2,10%. Kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi masih banyak melaporkan SPT Tahunan secara manual daripada sistem e-filing.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No	Nama, Tahun Judul, Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Arsyie (2014) dengan judul Analisis Penerapan <i>E-Filing</i> Dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT XYZ (Studi Kasus Pada PT XYZ)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filing</i> menurut persepsi karyawan PT XYZ dinilai bermanfaat dalam mempermudah penyampaian SPT. Selain itu, dari segi tampilan <i>e-filing</i> cukup mudah dipahami dan dipelajari dan diharapkan untuk terus ditingkatkan di tahun pajak berikutnya terutama dalam hal sosialisasi tata cara penggunaan.	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang <i>e-filing</i> . Perbedaannya yaitu pada objek penelitian, teknik dan indikator pembahasan yang digunakan.
2	Sari (2015) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> terhadap	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh

	Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten.	ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai <i>R Square</i> sebesar 0,358, yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 35,8%.	penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya yaitu pada objek penelitian, teknik dan indikator pembahasan yang digunakan.
3	Dwi dan Fany (2015) Analisis Penerapan Aplikasi <i>E-Filing</i> Dalam Melaporkan Spt Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara	Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah sistem e-filing tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Persentase Pelaporan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2013 secara manual 28,85% pada tahun 2014 sebesar 31,60%, sedangkan secara e-filing tahun 2013 0,10% pada tahun 2014 sebesar 2,10%.	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang <i>e-filing</i> . Perbedaannya yaitu pada objek penelitian, teknik dan indikator pembahasan yang digunakan.

Sumber: Penulis, 2016

## B. Landasan Teori

### 1. Pajak

#### a. Pengertian Pajak

Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2013: 1) :  
 pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Siti (2009: 1) definisi pajak dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yaitu:  
 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara dan sifatnya dapat dipaksakan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum menurut undang-undang.

Siti Resmi (2009: 12) ciri-ciri pajak, yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individual)
- 3) Pajak yang diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemungutan masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment* sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai

sumber keuangan negara.

- 4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

## **b. Fungsi Pajak**

Mardiasmo (2013: 1-2) fungsi pajak, yaitu:

### 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh: Dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan

### 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

## **c. Syarat Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2013: 2-3) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (*Syarat Keadilan*)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (*Syarat Yuridis*)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (*Syarat Ekonomis*)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan Pajak harus efisien (*Syarat Finansial*)

Sesuai fungsi bujetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemunutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

#### **d. Pengelompokan Pajak**

Mardiasmo (2013: 5) mengelompokkan pajak:

- 1) Menurut golongannya
  - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- (1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.  
(2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

## e. Tata Cara Pemungutan Pajak

### 1) Stelsel Pajak

Mardiasmo (2013: 6-7). Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

#### a) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pajak objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

#### b) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang – undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali.

Waluyo (2010: 33). Undang – undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut stelsel campuran, dimana pada awal tahun pajak, angsuran pajak (PPH pasal 25) berdasarkan besarnya pajak terutang pada Surat Pemberitahuan tahun sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan sesungguhnya diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Jika terdapat kekurangan maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu yang berlaku saat ini adalah tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.

## 2) Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013: 7) asas pemungutan pajak :

### a) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

### b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

## f. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Mardiasmo (2013: 8). Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

### 1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assesment System*.

## 2) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenakan pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada Sel Assesment System.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

- 1) Pembayaran
- 2) Kompensasi
- 3) Daluwarsa
- 4) Pembebasan dan penghapusan.

### **g. Hambatan Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2013: 8-9). Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

#### 1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

## 2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## 2. Penerapan Sistem *E-Filling*

### a. Pengertian *E-Filling*

Fidel (2010: 56) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*. *E-filling* sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi

(*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *E-filing* diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 30 Desember 2011. Secara khusus, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *E-filing* pada situs Direktorat Jenderal Pajak diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *E-filing* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) tanggal 23 Desember 2011.

Beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP menurut Fidel (2010) adalah sebagai berikut:

- 1) <http://www.pajakku.com>
- 2) <http://www.laporpajak.com>
- 3) <http://www.taxreport.web.id>
- 4) <http://www.layananpajak.com>
- 5) <http://www.onlinepajak.com>
- 6) <http://www.setorpajak.com>

7) <http://www.pajakmandiri.com>

8) <http://www.spt.co.id>

Gita (2010: 29) *e-filling* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. *E-filling* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bias menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filling* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Berikut ini proses untuk melakukan *e-filling* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filling* (diakses melalui <http://www.pajak.go.id>):

- 1) Mengajukan permohonan *Eletronik Filling Identification Number (e-FIN)* secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *e-filling*. Pengajuan permohonan *e-FIN* dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat.

- 2) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya *e-FIN*. Setelah mendaftar diri, Wajib Pajak akan memperoleh *username* dan *password*, tautan aktivitas akun *e-filing* melalui *e-mail* yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan *digital certificate* yang berfungsi sebagai pengamanan data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.
- 3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:
  - a) Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-filing* di situs DJP. *E-SPT* adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (*Compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
  - b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman *e-SPT*, yang akan dikirimkan melalui *email* atau SMS.
  - c) Mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi.
  - d) *Notifikasi* status *e-SPT* akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui *email*. Bukti Penerimaan *ESPT* terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Sistem *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:

- 1) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
- 2) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

#### **b. Sistem *E-Filling***

Penerapan sistem *e-filling* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak (diakses melalui <http://www.pajak.go.id>) yaitu:

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- 3) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
- 4) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.

- 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- 6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- 7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account representative*.

### c. Kemudahan Menggunakan *E-Filling*

Davis dalam Nurul dan Noviadini (2012: 21) Kemudahan penggunaan merupakan tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi mudah untuk dipahami. Kemudahan yang dipersepsikan adalah tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem tertentu dapat menjadikan orang tersebut bebas dari usaha (*free of effort*). Bebas dari usaha yang dimaksudkan adalah bahwa saat seseorang menggunakan sistem, ia hanya memerlukan sedikit waktu untuk mempelajari sistem tersebut karena sistem tersebut sederhana, tidak rumit, dan mudah dipahami, sudah dikenal (*familiar*). Dimensi kemudahan menggunakan *E-Filling* menjadi berikut:

- 1) Interaksi individu dengan sistem jelas dan mudah dimengerti / dipahami.
- 2) Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi dengan sistem tersebut.
- 3) Sistem mudah digunakan.
- 4) Mudah mengoperasikan sistem sesuai dengan apa yang ingin individu kerjakan (fleksibel).

Berdasarkan pengertian di atas, kemudahan penggunaan merupakan keyakinan atau penilaian seseorang bahwa sistem teknologi informasi (*e-Filing*) yang akan digunakan tidak merepotkan saat akan digunakan dan mudah dipahami. Ketika seseorang menilai dan meyakini bahwa suatu sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya ketika seseorang menilai dan meyakini bahwa suatu sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya.

#### **d. Kebermanfaatan Menggunakan *E-filing***

Kebermanfaatan adalah tingkatan sejauh mana seseorang yakin bahwa menggunakan sebuah sistem akan meningkatkan kinerjanya. Davis dalam Nurul dan Noviandini (2012: 21) kebermanfaatan sistem bagi penggunanya berkaitan dengan produktifitas dan efektifitas sistem tersebut dari kegunaan dalam

tugas secara menyeluruh. kebermanfaatan dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu (1) kebermanfaatan dengan estimasi satu faktor, dan (2) kebermanfaatan dengan estimasi dua faktor (kebermanfaatan dan efektifitas). kebermanfaatan dengan estimasi satu faktor meliputi dimensi:

- 1) Menjadikan pekerjaan lebih mudah
- 2) Bermanfaat
- 3) Menambah produktifitas
- 4) Mempertinggi efektifitas
- 5) Mengembangkan kinerja pekerjaan

Kebermanfaatan dengan estimasi dua faktor dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu kebermanfaatan dan efektifitas, dengan dimensi-dimensi masing-masing yang dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kebermanfaatan meliputi dimensi : menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, menambah produktifitas.
- 2) Efektifitas meliputi dimensi : mempertinggi efektifitas, mengembangkan kinerja pekerjaan.

Dalam konteks *e-Filing* di penelitian ini, kebermanfaatan ini diartikan sebagai seberapa besar manfaat sistem *e-Filing* bagi wajib pajak dalam proses pelaporan SPT. Oleh karena itu, besarnya manfaat yang diperoleh mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut. Dalam penelitian ini

menggunakan estimasi satu faktor dengan sedikit modifikasi menghilangkan satu indikator yang tidak cocok dengan kebermanfaatan *e-Filing* yaitu menjadikan pekerjaan lebih mudah, hal ini dikarenakan sasaran penelitian ini adalah wajib pajak bukan pegawai pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Sugiyono (2009: 53-55), jenis penelitian tingkat eksplanasinya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komperatif

Penelitian Komperatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabel nya sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui penerapan sistem *e-filling* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Arah Bandara SMB II Palembang, Telp : 0711-385108.

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>
Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> SPT Tahunan	Sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem <i>online</i> dan <i>real time</i> melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak	a. Kemudahan Menggunakan <i>E-Filing</i> b. Kebermanfaatan Menggunakan <i>E-Filing</i>

Sumber: *Penulis*, 2016

## D. Populasi dan Sampel

Iqbal (2010: 84), populasi (*universe*) adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian). Objek atau nilai disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, hasil produksi, rumah tangga, dan lain-lain. Populasi dalam penelitian ini adalah

pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 74 orang pegawai. Penelitian ini akan dilakukan kepada seluruh populasi yaitu 74 orang pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **E. Data yang Diperlukan**

Husein (2011:42) data penelitian pada dasarnya dapat yang dikelompokkan menjadi :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel – tabel atau diagram – diagram.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang dibagikan kepada responden, sedangkan data sekunder yaitu diperoleh dari artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Sugiyono (2009: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Kuisisioner disebarkan pada responden, sedangkan wawancara yaitu komunikasi langsung dengan pegawai yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dokumentasi data-data, struktur organisasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## **G. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **1. Analisis Data**

Sugiyono (2009: 13-14), menyatakan ada dua jenis metode analisis yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

#### **a. Analisis Kualitatif**

Analisis Kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

#### **b. Analisis Kuantitatif**

Analisis Kuantitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem *E-Filling* dalam menyampaikan SPT Tahunan.

### **2. Teknik Analisis**

Sugiyono (2012: 93), terdapat beberapa macam skala pengukuran dalam teknik analisis:

#### **a. Skala Likert**

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

b. Skala Guttman

Skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya-tidak”; “benar-salah”; “pernah-tidak pernah”; positif-negatif; dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi (dua *alternative*).

c. *Semantic Differensial*

Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun *checklist*, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban “sangat positif” terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang “sangat negatif” terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap / karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang.

d. *Rating Scale*

Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan *rating-scale* data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala likert. Pada skala likert, jawaban pada skala likert dapat berupa kata-kata antara lain:

Sangat Setuju	= SS	= 5
Setuju	= S	= 4
Ragu-ragu	= RR	= 3
Tidak Setuju	= TS	= 2
Sangat Tidak Setuju	= STS	= 1

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variable, kemudian indikator tersebut akan dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada responden, kemudian direkap dalam bentuk tabulasi, dan dihitung persentase tiap jawaban dari instrument kuisisioner dan dijelaskan secara kualitatif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Paradigma penanganan bencana telah banyak mengalami perubahan. Penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat saja akan tetapi lebih kepada keseluruhan manajemen bencana. Seiring dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup aspek yang lebih luas, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dengan demikian maka paradigma penanggulangan bencana diharapkan agar dapat mewujudkan optimalisasi manajemen bencana di berbagai wilayah.

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi manajemen bencana di wilayah provinsi maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil langkah-langkah strategis diantaranya melalui pembentukan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di wilayah provinsi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan juga merujuk kepada ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Seiring dengan semakin meningkatnya kejadian bencana di wilayah Provinsi Sumatera Selatan maka tugas yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentunya semakin berat. Apabila dilihat dari frekuensi bencana, pada tahun 2013 sebanyak 219 kejadian bencana alam yang terjadi di Sumatera Selatan atau meningkat dari 144 kejadian pada tahun 2012. Bencana yang paling sering terjadi yaitu kebakaran, banjir, angin puting beliung, tanah longsor. Jika dilihat secara kewilayahan, maka diantara 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan maka kota Palembang merupakan wilayah terbanyak yang mengalami kejadian bencana tahun 2013 yaitu telah terjadi 32 kejadian bencana. Sementara urutan kedua dan ketiga terbanyak terjadi. Bencana di Kota Pagar Alam yaitu 27 bencana dan Kabupaten Muara Enim 18 bencana. Jumlah korban yang meninggal dunia akibat bencana alam juga tidak sedikit 27 orang, luka berat 4 orang dan luka ringan 14 orang.

Dengan semakin tingginya tuntutan terhadap optimalisasi penanganan bencana yang terjadi maka kinerja lembaga penanggulangan bencana di daerah juga harus lebih ditingkatkan. Pembenahan dan perbaikan kinerja mutlak harus dilakukan baik dengan melalui perbaikan kinerja kelembagaan ataupun dengan peningkatan profesionalisme aparat

BPBD di daerah. Disamping itu upaya sinergitas dan peningkatan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang juga tidak kalah pentingnya.

Sebagai salah satu upaya optimalisasi penanganan bencana, maka penyusunan rencana strategis pada lembaga penanggulangan bencana khususnya pada BPBD Provinsi Sumatera Selatan merupakan wujud dari upaya mewujudkan berbagai langkah yang sistematis dan strategis yang akan ditempuh pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Upaya perbaikan proses penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Sumatera Selatan terus dilakukan secara maksimal, diantaranya sesuai dengan arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka proses penyusunan Rencana Strategis BPBD

Provinsi Sumatera Selatan akan mencoba untuk menerapkan beberapa prinsip mendasar yang lazim digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga rencana strategis ini diharapkan akan mampu : a) menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah daerah bersama para

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu dalam perumusan rencana strategis ini diharapkan akan mampu menjawab berbagai tantangan saat ini yaitu mewujudkan perencanaan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Namun demikian upaya ini akan sangat tergantung pada komitmen yang tinggi para pengambil kebijakan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya terkait dengan perencanaan penanggulangan bencana daerah.

## 2. Visi dan Misi BPBD Provinsi Sumatera Selatan

### **VISI :**

“SUMATERA SELATAN *PRO-DISASTER RISK REDUCTION* 2018”

**Pro-Disaster Risk Reduction** merupakan perubahan paradigma penanggulangan bencana yang tidak lagi sekedar fokus pada tanggap darurat, tapi pada pengurangan risiko bencana atau langkah preventif sebelum terjadinya bencana.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 maka Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan harus mampu mengoptimalkan

perannya dalam koordinasi penanggulangan bencana dan akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan efektivitas penanganan tanggap darurat bencana serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pemulihan pasca bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan.

**MISI :**

Dalam mewujudkan Visi BPBD Provinsi Sumatera Selatan tersebut secara sistematis dan bertahap menuntut adanya kesiapan serta kemampuan dalam penanggulangan bencana, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk itu, Misi BPBD Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengurangi faktor – faktor bencana yang mendasar.
- b. Membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang handal yang terintegrasi dengan budaya keselamatan dan ketahanan di semua level masyarakat melalui penerapan inovasi.
- c. Melakukan identifikasi, kajian dan monitoring resiko bencana yang terintegrasi dalam sistem peringatan dini ( early warning system).
- d. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

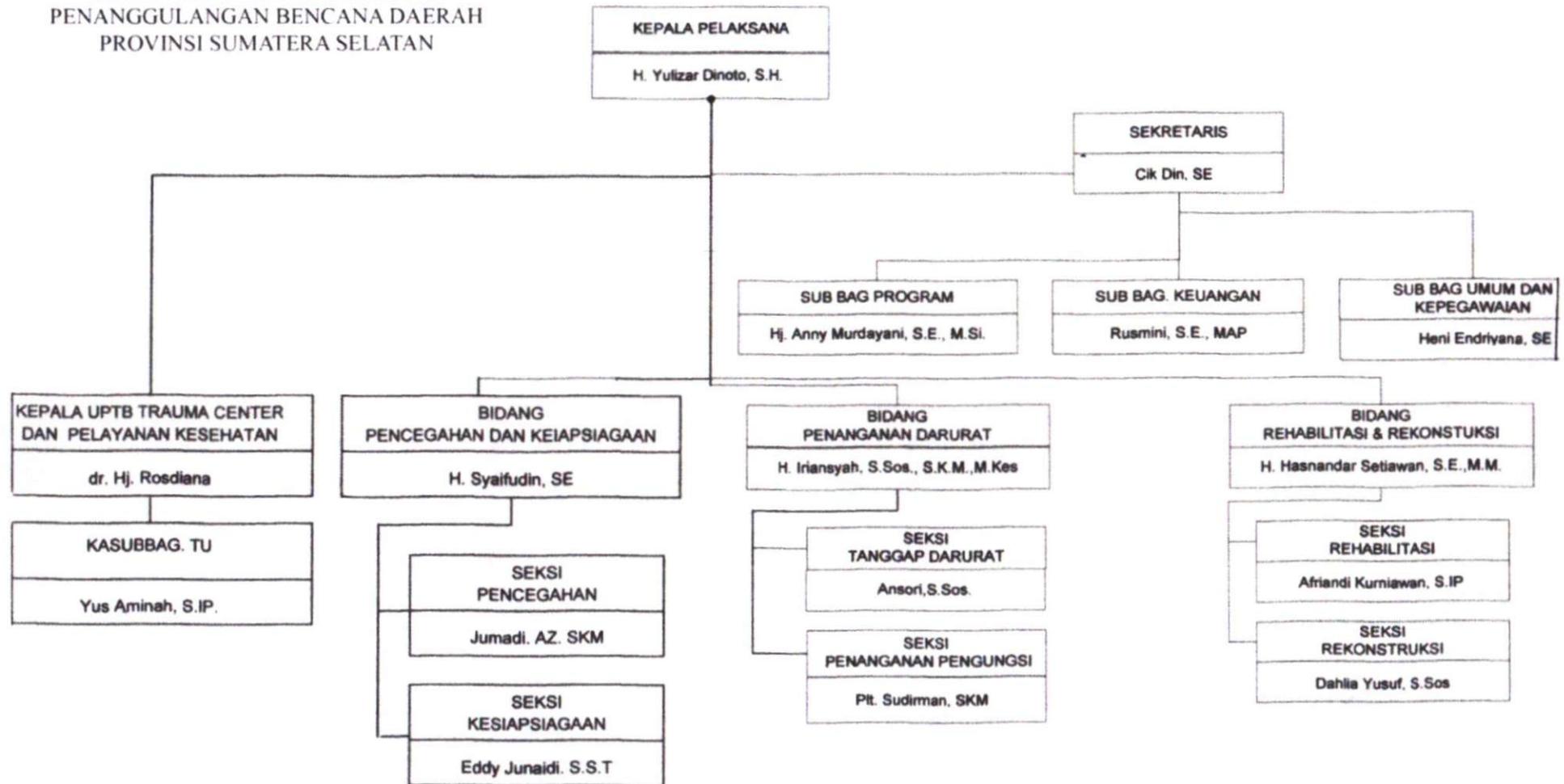
Upaya pencapaian Misi pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar Dinas/Intansi, Kantor dan Badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BPBD Provinsi Sumatera Selatan agar dapat sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

### **3. Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Selatan**

Struktur organisasi didirikan dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan sebagai upaya untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan tersebut. Penyusunan struktur organisasi sangat dibutuhkan sebagai pedoman pembagian tugas dan wewenang dalam kedudukan masing-masing dan hubungan antara bagian itu sendiri secara jelas. Struktur organisasi pada Dinas BPBD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut ini:

Gambar IV.1  
Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Sumber: Dinas BPBD Provinsi Sumatera Selatan, 2016

#### **4. Tugas dan Tanggung Jawab BPBD Provinsi Sumatera Selatan**

Dalam upaya melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terencana, sistematis dan menyeluruh di Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan telah memberikan apresiasi dengan membentuk kelembagaan penanggulangan bencana, melalui Peraturan Daerah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan amanat dari pelaksanaan Undang – Undang nomor 24 Tahun 2007. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Penanggulangan Bencana, mengemban tugas dan tanggung jawab mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;

- c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi :

- a. Koordinasi penanggulangan bencana;

- b. Komando penanggulangan bencana; dan
- c. Pelaksana penanggulangan bencana.

Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana:

**Koordinasi** penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

**Komando** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

**Pelaksana**, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan

penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah secara optimal melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007;
- b. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik;
- c. Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana;
- d. Sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk terus

mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu;

- e. peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan, yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota; dan yang terakhir adalah
- f. Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan bersama.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

a. **Kepala Unsur Pelaksana**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan konsep koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
- 4) Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;

- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretariat**

Mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerja sama bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana;
- 3) Pelaksanaan jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**c. Bidang Penanganan Darurat**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat

terjadinya bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang penanganan darurat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kegiatan dasar dan perlindungan pengungsi;
- 3) Pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- 4) Perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- 5) Memobilisasikan satuan tugas reaksi cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana;
- 6) Pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang ini membawahi :
  - a) Seksi Tanggap Darurat
  - b) Seksi Penanganan

d. **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- 3) Pengkomandoan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Bidang ini membawahi :
  - a) Seksi rehabilitasi
  - b) Seksi Rekonstruksi

e. **Bidang UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan pasca terjadinya bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan UPTB trauma center dan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada kebijakan program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Penyusunan dan pengusulan anggaran untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana UPTB Pelayanan Trauma center dan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Pengusulan penempatan personil UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) Pengesahan prosedur pelayanan UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 5) Pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 6) Pelaksanaan bimbingan teknis Trauma Center Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan mutu layanan trauma center dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

- 7) Pemberian laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala;
- 8) Pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**f. Sub Bagian Tata Usaha**

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif baik kepada pelanggan maupun kepada semua unsur UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mengkoordinir, memeriksa dan menyampaikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Trauma center dan Pelayanan Kesehatan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- 1) Menyiapkan dokumen prosedur pelaksanaan trauma center yang berkaitan dengan persyaratan manajemen UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 2) Pengkajian ulang instruksi kerja yang digunakan terutama yang berkaitan dengan persyaratan manajemen pada UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 3) Pertanggungjawaban terhadap pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan seluruh kebutuhan administrasi dan bahan penunjang pada Trauma center dan Pelayanan Kesehatan serta dokumen terkait;

- 4) Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas personalia, keuangan, dokumentasi dan informasi;
- 5) Pertanggungjawaban terhadap surat-menyurat yang dilakukan oleh Kepala UPTB;
- 6) Pemberian delegasi kepada subordinatnya apabila berhalangan ;
- 7) Pelaporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Pelaksana Badan atas usul Kepala UPTB dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Badan;
- 3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. Deskriptif Responden

Dari hasil penelitian penulis memperoleh data populasi penelitian, data responden berdasarkan usia dan data responden berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel IV. 1**  
**Data Kuisisioner**

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	74
2	Kuesioner yang kembali	74
3	Kuesioner yang tidak kembali	0

*Sumber: Data diolah, 2016*

Kuesioner yang didistribusikan sebanyak 74 yang disebar kepada pegawai yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibagikan tanggal 15 Februari 2016 s/d 01 Maret 2016.

### a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut jumlah pegawai yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin:

**Tabel IV.2**  
**Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	46	62,2%
2	Perempuan	28	37,8%
Total		74	100%

*Sumber: Data diolah, 2016*

Berdasarkan tabel IV.2 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu 46 responden, sedangkan perempuan hanya 28 responden.

**b. Umur**

Berikut jumlah pegawai yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan umur:

**Tabel IV.3**  
**Data Pegawai Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah	%
1	< 25 Tahun	-	-
2	26-35 Tahun	18	24,3%
3	36-55 Tahun	51	68,9%
4	> 55 Tahun	5	6,8%
Total		74	100%

*Sumber: Data diolah, 2016*

Berdasarkan Tabel IV. 3 dapat diketahui jumlah responden rata-rata pada usia 36-55 tahun yaitu sebanyak 51 responden, dan tidak terdapat responden dengan usia kurang dari 25 tahun.

**c. Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Berikut jumlah pegawai yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki pegawai:

**Tabel IV.4**  
**Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	S1	35	47,3%
2	S2	22	29,7%
3	S3	5	6,8%
4	Lainnya	12	16,2%
Total		74	100%

*Sumber: Data diolah, 2016*

Berdasarkan Tabel IV.4 dapat diketahui jumlah responden rata-rata memiliki pendidikan S1 yaitu sebanyak 47,3 responden, dan terdapat 12 responden memiliki pendidikan lainnya yaitu SMA dan D3. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kompetensi dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

**d. Berdasarkan Lama Bekerja**

Berikut jumlah pegawai yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan lamanya pegawai bekerja:

**Tabel IV.5**  
**Data Pegawai Berdasarkan Lama Bekerja**

No	Lama Bekerja	Jumlah	%
1	< 1 Tahun	-	-
2	Antara 1-5 Tahun	7	9,5%
3	Antara 6-10 Tahun	40	54,1%
4	> 10 Tahun	27	36,5%
Total		74	100%

*Sumber: Data diolah, 2016*

Berdasarkan Tabel IV.5 dapat diketahui jumlah responden rata-rata memiliki lama bekerja dengan masa 6-10 Tahun yaitu sebanyak 40 responden.

## 6. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Data yang valid harus menjadi syarat dalam penelitian menggunakan kuesioner, sehingga diketahui bahwa daftar pernyataan yang ada dalam kuesioner valid dan layak untuk melanjutkan penelitian. Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif tidak berubah apabila pengukuran di ulangi dua kali atau lebih. Dengan kata lain, validitas adalah indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukuran didalam mengukur gejala yang sama.

Uji validitas dilakukan terhadap item-item pernyataan dari masing-masing variabel yang ada dalam kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana item-item membentuk konsep yang telah di susun dapat mewakili variabel penelitian. Sebuah konsep dikatakan dapat mewakili variabel apabila  $r_{hitung}$  dari pernyataan lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$ .

Nilai  $r_{tabel}$  untuk populasi pada penelitian ini sebanyak 74 responden dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi sebesar 5% dan  $n=74-2=72$  adalah 0,2287. Jadi, apabila  $r_{hitung}$  lebih kecil dari 0,2287 maka pernyataan tersebut di anggap tidak valid. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan *SPSS for windows versi 19* dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil pengujian validitas dari butir pernyataan pada variabel kebermanfaatan menggunakan *e-filling* adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.6**  
**Hasil pengujian validitas variabel kebermanfaatan menggunakan *e-filling***

<b>Butir Pernyataan</b>	<b><i>r</i><sub>hitung</sub></b>	<b><i>r</i><sub>tabel</sub></b>	<b>Status</b>
1	0,593	0,2287	Valid
2	0,688	0,2287	Valid
3	0,532	0,2287	Valid
4	0,229	0,2287	Valid
5	0,661	0,2287	Valid
6	0,574	0,2287	Valid
7	0,560	0,2287	Valid
8	0,663	0,2287	Valid
9	0,638	0,2287	Valid
10	0,595	0,2287	Valid
11	0,686	0,2287	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap butir pertanyaan dari variabel kebermanfaatan menggunakan *e-filling* di dapatkan bahwa 11 (sebelas) butir pernyataan dinyatakan valid.

Hasil dari pengujian validitas dari butir pernyataan pada variabel kemudahan menggunakan *e-filling* adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.7**  
**Hasil pengujian validitas variabel kemudahan menggunakan *e-filling***

<b>Butir Pernyataan</b>	<b><i>r</i><sub>hitung</sub></b>	<b><i>r</i><sub>tabel</sub></b>	<b>Status</b>
1	0,534	0,2287	Valid
2	0,582	0,2287	Valid
3	0,689	0,2287	Valid
4	0,690	0,2287	Valid
5	0,647	0,2287	Valid
6	0,555	0,2287	Valid
7	0,742	0,2287	Valid
8	0,506	0,2287	Valid
9	0,374	0,2287	Valid

10	0,634	0,2287	Valid
11	0,524	0,2287	Valid

*Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017*

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap butir pertanyaan dari variabel kemudahan menggunakan *e-filing* di dapatkan bahwa 11 (sebelas) butir pernyataan dinyatakan valid.

## **B. Pembahasan**

*E-filing* merupakan suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. terhadap penggunaan sistem e-Filing yaitu meliputi kebermanfaatan dan kemudahan menggunakan sistem *e-filing* sebagai berikut:

### **1. Kebermanfaatan Menggunakan Sistem *E-Filing***

(<http://pajak.go.id>) kebermanfaatan dalam penggunaan sistem *e-filing* yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24x7), efisien biaya karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT, penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem computer, data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT, ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat

Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR). Berikut hasil jawaban responden atas kebermanfaatannya:

**Tabel IV.8**  
**Rekapitulasi Jawaban Kebermanfaatannya Menggunakan Sistem**  
***E-filing***

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	S	SS
1	Dengan adanya <i>e-Filing</i> dapat mengembangkan kinerja saya	-	-	1	57	16
2	<i>e-Filing</i> akan membuat kinerja saya lebih baik dari hari ke hari	-	-	2	57	15
3	Menggunakan <i>e-Filing</i> mempermudah pekerjaan saya	-	3	-	56	15
4	Menggunakan <i>e-Filing</i> menguntungkan bagi saya	1	6	-	59	8
5	Secara keseluruhan <i>e-Filing</i> bermanfaat bagi saya	-	2	4	56	12
6	Menggunakan <i>e-Filing</i> mampu menambah tingkat produktifitas saya	-	3	6	56	9
7	<i>e-Filing</i> membuat waktu saya tidak terbuang percuma dalam mengerjakan tugas-tugas saya	-	1	1	52	20
8	Menggunakan <i>e-Filing</i> mampu meningkatkan kualitas hasil pekerjaan saya	-	1	1	54	18
9	Menggunakan <i>e-Filing</i> mampu meningkatkan efektifitas kinerja saya	-	1	4	53	16
10	Menggunakan <i>e-Filing</i> memungkinkan saya untuk mengerjakan tugas-tugas saya dengan lebih cepat	-	1	5	52	16
11	<i>e-Filing</i> memungkinkan saya untuk mengerjakan tugas saya dengan lebih praktis dan efisien	-	1	1	59	13

Sumber: Data diolah, 2016

Pembahasan lebih lanjut untuk kebermanfaatannya dalam menggunakan *e-filing* dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan pernyataan pertama terdapat 1 responden atau 1,4% mengatakan ragu-ragu karena belum merasakan adanya *e-Filing* dapat mengembangkan kinerja mereka. 57 responden atau 77,0% mengatakan setuju dan 16 responden atau 21,6% mengatakan sangat setuju karena *e-Filing* mengembangkan kinerja pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan saat penggunaan *e-filing* mereka dapat melaporkan pajak dengan lebih mudah, sehingga waktu mereka tidak terlalu banyak terpakai untuk pelaporan SPT. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang ragu dikarenakan mereka belum terlalu memahami penggunaan *e-filing* sehingga dalam menggunakannya masih perlu dibimbing.

Berdasarkan pernyataan kedua terdapat 2 responden atau 2,7% mengatakan ragu-ragu karena belum merasakan adanya *e-Filing* dapat membuat kinerja mereka lebih baik dari hari ke hari. 57 responden atau 77,0% mengatakan setuju dan 15 responden atau 20,3% mengatakan sangat setuju karena *e-Filing* membuat kinerja pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih baik dari hari ke hari.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan saat penggunaan *e-filling* mereka dapat melaporkan pajak dengan lebih mudah, sehingga waktu mereka tidak terlalu banyak terpakai untuk pelaporan SPT, semakin pegawai mempelajari penggunaan *e-filling* pegawai akan memanfaatkan waktu menyelesaikan pekerjaan yang lain lebih efektif. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang ragu merasa sulit mengaplikasikan sistem *e-filling*, dan juga dikarenakan mereka belum terlalu memahami penggunaan *e-filling* dengan lebih efektif.

Berdasarkan pernyataan ketiga terdapat 3 responden atau 4,1% mengatakan ragu-ragu karena belum merasakan penggunaan *e-Filing* mempermudah pekerjaannya. Terdapat 56 responden atau 75,7% mengatakan setuju dan 15 responden atau 20,3% mengatakan sangat setuju karena menggunakan *e-Filing* mempermudah pekerjaan mereka.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan *e-Filing* mempermudah pekerjaan, baik dalam mendaftar dan menggunakan *e-filling* dalam melaporkan pajak dengan lebih mudah, pegawai bisa menggunakan *e-filling* dimana saja membuat pegawai tidak perlu datang langsung ke kantor pajak. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang ragu-ragu karena merasa sulit dalam menggunakan sistem *e-filling*, dan pengaksesan harus secara online.

Berdasarkan pernyataan keempat terdapat 1 responden atau 1,4% mengatakan sangat tidak setuju dan 6 responden atau 8,1% mengatakan tidak setuju karena belum merasakan penggunaan *e-Filing* menguntungkan bagi responden. Terdapat 59 responden atau 79,7% mengatakan setuju dan 8 responden atau 10,8% mengatakan sangat setuju karena menggunakan *e-Filing* menguntungkan bagi responden.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan *e-Filing* menguntungkan bagi mereka, baik dalam mendaftar dan menggunakan *e-filling* dalam melaporkan pajak dengan lebih mudah, pegawai bisa menggunakan *e-filling* dimana saja membuat pegawai tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk datang ke kantor pajak. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang tidak setuju karena merasa belum terlalu memahami penggunaan sistem *e-filling*, karena tidak menguasai pengaksesan secara online.

Berdasarkan pernyataan kelima terdapat 2 responden atau 2,7% mengatakan tidak setuju responden atau 4,1% mengatakan ragu-ragu karena belum merasakan secara keseluruhan *e-Filing* bermanfaat bagi responden. Terdapat 56 responden atau 75,7% mengatakan setuju dan 15 responden atau 20,3% mengatakan sangat setuju karena secara keseluruhan *e-Filing* bermanfaat bagi responden.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan *e-Filing* secara

keseluruhan *e-Filing* sangat bermanfaat. Pegawai bisa menggunakan *e-filling* dimana saja karena sistem secara online, serta pegawai tidak harus datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang ragu-ragu karena belum terlalu memahami penggunaan sistem online, sehingga membutuhkan waktu dalam menggunakan *e-filling*.

Berdasarkan pernyataan keenam terdapat 3 responden atau 4,1% mengatakantidak setuju menggunakan *e-Filing* mampu menambah tingkat produktifitas. 6 responden atau 8,1% mengatakan ragu-ragu karena menggunakan *e-Filing* masih belum meningkatkan produktifitas responden. 56 responden atau 75,7% mengatakan setuju dan 9 responden atau 12,2% mengatakan sangat setuju karena menggunakan *e-Filing* mampu menambah tingkat produktifitas pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan saat penggunaan *e-filling* mereka mampu menambah tingkat produktifitasnya, karena lebih mudah dan lebih cepat sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan yang lain, sehingga waktu mereka tidak terlalu banyak terpakai untuk pelaporan SPT. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang tidak setuju dan ragu dikarenakan penggunaan *e-Filing* belum menambah tingkat produktifitas pegawai, hal tersebut karena mereka belum terlalu

memahami penggunaan *e-filing* sehingga dalam penggunaannya masih membutuhkan waktu.

Berdasarkan pernyataan ketujuh terdapat 2 responden atau 2,7% mengatakan ragu-ragu karena menggunakan *e-Filing* membuat waktu responden tidak terbuang percuma dalam mengerjakan tugas-tugas responden namun masih membutuhkan waktu. Terdapat 57 responden atau 77% mengatakan setuju dan 15 responden atau 20,3% mengatakan sangat setuju karena *e-Filing* membuat waktu responden tidak terbuang percuma dalam mengerjakan tugas-tuganya.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan penggunaan *e-Filing* membuat waktu pegawai tidak terbuang percuma dalam mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga *e-Filing* menguntungkan bagi mereka. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang ragu-ragu karena pengerjaan *e-Filing* masih membutuhkan waktu lumayan lama sehingga masih belum meningkatkan efektivitas pengerjaan tugas-tugas pegawai karena merasa pemahaman dalam penggunaan sistem *e-filing* masih tergolong sedikit.

Berdasarkan pernyataan kedelapan terdapat 2 responden atau 2,7% mengatakan tidak setuju dan 2 responden atau 2,7% mengatakan ragu-ragu karena belum merasakan penggunaan *e-Filing* mampu meningkatkan kualitas hasil pekerjaan. 57 responden atau 77,0% mengatakan setuju dan

13 responden atau 17,6% mengatakan sangat setuju karena menggunakan *e-Filing* mampu meningkatkan kualitas hasil pekerjaan.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan saat menggunakan *e-Filing* dalam pelaporan pajak meningkatkan kualitas hasil pekerjaan pegawai, dikarenakan pengisian sudah dilakukan menggunakan sistem sehingga perhitungannya sudah otomatis. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang tidak setuju dan ragu dikarenakan pada saat penggunaan *e-Filing* pegawai baru mendaftar atau menggunakan *e-Filing* dalam melaporkan SPT sehingga belum merasakan peningkatan kualitas hasil pekerjaannya.

Berdasarkan pernyataan kesembilan terdapat 1 responden atau 1,4% menjawab tidak setuju dan 8 responden atau 10,8% mengatakan ragu-ragu karena belum merasakan *e-Filing* mampu meningkatkan efektifitas kinerja. Terdapat 53 responden atau 71,6% mengatakan setuju dan 13 responden atau 17,6% mengatakan sangat setuju karena *e-Filing* mampu meningkatkan efektifitas kinerja responden.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan sistem *e-Filing* mampu meningkatkan efektifitas kinerja pegawai. Pegawai bisa menggunakan *e-filling* dimana saja karena sistem secara online, serta pegawai tidak harus datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak sehingga lebih efektif. Berdasarkan wawancara masih adanya responden

yang tidak setuju dan ragu-ragu karena belum terlalu memahami penggunaan *e-Filing* sehingga belum terlihat efektifitas dari menggunakan sistem tersebut.

Berdasarkan pernyataan kesepuluh terdapat 1 responden atau 1,4% mengatakan tidak setuju dan 5 responden atau 6,8% mengatakan ragu-ragu karena jika penggunaan *e-Filing* membuat pegawai mengerjakan tugas-tugasnya dengan lebih cepat. Terdapat 52 responden atau 70,3% mengatakan setuju dan 16 responden atau 21,6% mengatakan sangat setuju karena dengan menggunakan *e-Filing* memungkinkan pegawai untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan lebih cepat.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan penggunaan *e-Filing* membantu pegawai mengerjakan tugas-tugasnya dengan lebih cepat, karena menggunakan sistem tersebut lebih mudah dan tidak lama, serta tidak perlu ke kantor pajak sehingga pegawai dapat segera menyelesaikan pelaporan pajak sehingga dapat mengerjakan pekerjaan yang lain. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang tidak setuju dan ragu-ragu karena masih sedikitnya pemahaman pegawai dalam menggunakan sistem *e-Filing* masih membutuhkan waktu dalam penyelesaian pekerjaan tersebut.

Berdasarkan pernyataan kesebelas terdapat 1 responden atau 1,4% mengatakan tidak setuju dan 1 responden atau 1,4% mengatakan ragu-ragu karena jika *e-Filing* memungkinkan responden untuk mengerjakan

tugasnya dengan lebih praktis dan efisien. Terdapat 59 responden atau 79,7% mengatakan setuju dan 13 responden atau 17,2% mengatakan sangat setuju karena penggunaan *e-Filing* memungkinkan responden untuk mengerjakan tugasnya dengan lebih praktis dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan penggunaan *e-Filing* memungkinkan responden untuk mengerjakan tugasnya dengan lebih praktis dan efisien, karena menggunakan sistem tersebut pegawai tidak perlu ke kantor pajak sehingga pengeluaran biaya untuk pelaporan pajak lebih efisien, efisien waktu dan efisien biaya transport yang seharusnya dikeluarkan saat harus datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang tidak setuju dan ragu-ragu karena masih sedikitnya pemahaman pegawai dalam penggunaan *e-Filing* dan pegawai harus sambil membaca pedoman penggunaan *e-Filing*, sehingga belum merasa penggunaan sistem tersebut lebih praktis dan efisien.

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisisioner kebermanfaatan menggunakan sistem *E-filling* dalam menerapkan sistem *e-Filling* dari 11 pernyataan dan 74 responden yang menjawab setuju dan sangat setuju sebanyak 769 dari total 814 jadi 94,47%. Berdasarkan frekuensi jawaban responden untuk kebermanfaatan menunjukkan 94,47% setuju dan sangat setuju, yang artinya 94,47% Wajib Pajak yang menggunakan *e-Filing* merasa bahwa menggunakan *e-Filing* dalam menyampaikan SPT memberikan manfaat yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak percaya dan merasakan manfaat dalam menggunakan *e-Filing* pada

saat penyampaian SPT secara *online* menjadikan pekerjaan lebih mudah dan efektif. Manfaat yang diperoleh tersebut membuat Wajib Pajak berkeinginan untuk menggunakan *e-Filing* untuk pelaporan pajak pada periode tahun pajak selanjutnya.

Penggunaan *e-Filing* bermanfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah di tempat kerja Wajib Pajak dapat menambah produktifitas dengan menggunakan waktu luangnya saat bekerja untuk menyampaikan SPT dengan menggunakan *e-Filing*. Hal ini karena di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah menyediakan system online sehingga dapat mengakses *e-filling* tersebut. Masih terdapat beberapa responden yang belum merasakan manfaat penggunaan *e-Filing* dikarenakan belum paham dalam menggunakan sistem tersebut sehingga masih dibutuhkan waktu dalam menggunakan sistem tersebut.

## **2. Kemudahan Menggunakan Sistem *E-Filing***

Kemudahan penggunaan merupakan tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi mudah untuk dipahami. Kemudahan penggunaan *e-filling* meliputi dari tampilan sistem *e-filling*, pendaftaran, pengisian dan penggunaan sistem. Tampilan sistem yang cukup jelas sehingga memudahkan proses pendaftaran dan penggunaan sistem tersebut dalam pelaporan SPT menggunakan *e-filling*. Berikut hasil jawaban responden atas kemudahan:

**Tabel IV.9**  
**Rekapitulasi Jawaban Kemudahan Menggunakan Sistem *E-filing***

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	S	SS
1	Saat menggunakan <i>e-Filing</i> , saya dapat mengoperasikannya sesuai dengan kebutuhan saya			3	54	17
2	Saya merasa <i>e-Filing</i> sangat fleksibel untuk digunakan			2	59	13
3	Interaksi saya dengan <i>e-Filing</i> jelas dan mudah dipahami		1		61	12
4	Saya jarang mengalami kebingungan saat menggunakan <i>e-Filing</i>	1	2	6	58	7
5	Tampilan <i>e-Filing</i> mudah untuk dibaca sehingga saya mudah untuk memahaminya	1	1	1	62	9
6	Mudah bagi saya untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan <i>e-Filing</i>			1	62	11
7	Mudah bagi saya untuk menggunakan <i>e-Filing</i> secara terampil	1	3	12	48	10
8	Saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan berlanjut ketika mengoperasikan <i>e-Filing</i>				60	14
9	Saya tidak membutuhkan usaha yang keras untuk dapat berinteraksi dengan <i>e-Filing</i>		8	11	45	10
10	Saya tidak merasa <i>e-Filing</i> merupakan suatu sistem yang rumit			1	57	16
11	Saya mudah berinteraksi dengan sistem <i>e-Filing</i> saat melaporkan pajak			1	59	14

Sumber: Data diolah, 2016

Pembahasan lebih lanjut untuk kemudahan menggunakan sistem *E-filing* dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan pernyataan pertama terdapat 3 responden atau 4,1% mengatakan ragu-ragu karena saat menggunakan *e-Filing*, belum dapat mengoperasikannya sesuai dengan kebutuhan. Terdapat 54 responden atau 73,0% mengatakan setuju dan 17 responden atau 23,0% mengatakan sangat setuju karena saat menggunakan *e-Filing*, responden dapat mengoperasikannya sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan sistem *e-Filing* pegawai dapat mengoperasikannya sesuai dengan kebutuhan

pegawai, dengan adanya sistem tersebut bermanfaat meningkatkan produktifitas kerja pegawai karena dalam pelaporan pajak tidak perlu banyak membuang waktu. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang ragu-ragu karena belum terlalu memahami penggunaan *e-Filing* secara menyeluruh sehingga belum dapat mengoperasikannya sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pernyataan kedua terdapat 2 responden atau 2,7% mengatakan ragu-ragu karena belum merasakan *e-Filing* fleksibel untuk digunakan. Terdapat 59 responden atau 79,7% mengatakan setuju dan 13 responden atau 17,6% mengatakan sangat setuju karena *e-Filing* sangat fleksibel untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan sistem *e-Filing* pegawai dapat melaporkan pajaknya dengan lebih praktis, karena *e-Filing* sangat fleksibel untuk digunakan. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang ragu-ragu karena belum menguasai penggunaannya sehingga belum merasakan kalau penggunaan *e-Filling* lebih flexible dibandingkan dengan melaporkan pajak dengan datang langsung ke kantor.

Berdasarkan pernyataan ketiga terdapat 1 responden atau 1,4% mengatakan tidak setuju karena interaksi atau hubungan responden dengan *e-Filing* masih belum dapat memahami penggunaan sistem

tersebut. Terdapat 61 responden atau 82,4% mengatakan setuju dan 12 responden atau 16,2% mengatakan sangat setuju karena saat menggunakan *e-Filing* cukup jelas dan mudah dipahami dalam menerapkannya.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan sistem *e-Filing* pegawai dapat mengoperasikannya sesuai dengan kebutuhan pegawai, pendaftaran dan pengisian SPT lebih mudah karena kolom yang ada di sistem sudah jelas dan mudah dipahami. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang ragu-ragu karena belum terlalu memahami penggunaan *e-Filing* secara menyeluruh sehingga belum dapat interaksi dengan *e-Filing*.

Berdasarkan pernyataan keempat terdapat 1 responden atau 1,4% mengatakan sangat tidak setuju dan 2 responden atau 2,7% mengatakan tidak setuju karena masih bingung dalam menggunakan *e-Filing*, 6 responden atau 8,1% mengatakan ragu-ragu karena saat menggunakan *e-Filing* masih terdapat beberapa hal yang belum dipahami. Terdapat 58 responden atau 78,4% mengatakan setuju dan 7 responden atau 9,5% mengatakan sangat setuju karena saat menggunakan *e-Filing*, responden jarang mengalami kebingungan saat menggunakan *e-Filing*.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan sistem *e-Filing* pegawai jarang mengalami kebingungan saat menggunakan

sistem tersebut, pegawai dapat mengoperasikannya sesuai dengan kebutuhan pegawai, dengan adanya sistem tersebut bermanfaat meningkatkan produktifitas kerja pegawai karena dalam pelaporan pajak tidak perlu banyak membuang waktu. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang tidak setuju dan ragu-ragu karena belum terlalu memahami penggunaan *e-Filing*, sehingga sering mengalami kebingungan saat menggunakan *e-Filing*.

Berdasarkan pernyataan kelima terdapat 1 responden atau 1,4% mengatakan sangat tidak setuju dan 1 responden atau 1,4% mengatakan tidak setuju karena belum paham saat melihat tampilan *e-Filing*. 1 responden atau 1,4% menjawab ragu-ragu. Terdapat 62 responden atau 83,8% mengatakan setuju dan 9 responden atau 12,2% mengatakan sangat setuju karena tampilan *e-Filing* mudah untuk dibaca sehingga saya mudah untuk memahaminya.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sistem *e-Filing* mudah untuk dibaca sehingga pegawai mudah untuk memahaminya, pegawai dapat melaporkan pajaknya dengan lebih praktis. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang tidak setuju dan ragu-ragu karena belum memahami tampilan yang ada pada sistem *e-Filling* sehingga masih perlu bertanya kepada yang lain untuk membantu dalam pelaporan pajak menggunakan sistem tersebut.

Berdasarkan pernyataan keenam terdapat 1 responden atau 1,4% mengatakan ragu-ragu karena untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan *e-Filing* responden masih membutuhkan waktu. Terdapat 62 responden atau 83,8% mengatakan setuju dan 11 responden atau 14,9% mengatakan sangat setuju karena dalam mempelajari cara menggunakan *e-Filing* responden merasa itu tidaklah sulit.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menurut pegawai dalam mempelajari cara menggunakan *e-Filing* responden sangat mudah dan dengan menggunakan sistem *e-Filing* membuat pekerjaan lebih efektif. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang ragu-ragu karena belum ada sosialisasi ke beberapa pegawai, sehingga bagi pegawai masih agak susah dalam menggunakan *e-Filing* secara terampil.

Berdasarkan pernyataan ketujuh terdapat 1 responden atau 1,4% mengatakan sangat tidak setuju dan 3 responden atau 4,1% mengatakan tidak setuju karena ragu-ragu karena masih belum terampil dalam menggunakan *e-Filing*. Terdapat 12 responden atau 16,2% menjawab ragu-ragu. untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan *e-Filing* responden masih membutuhkan waktu. Terdapat 48 responden atau 64,9% mengatakan setuju dan 10 responden atau 13,5% mengatakan sangat setuju karena mudah bagi responden dalam menggunakan *e-Filing* secara terampil.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan mudah bagi pegawai dalam menggunakan *e-Filing* secara terampil, karena mudah mempelajari dan menggunakan sistem tersebut. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang tidak setuju dan ragu-ragu karena masih susah dalam mempelajari cara menggunakan sistem *e-Filing*.

Berdasarkan pernyataan kedelapan terdapat 60 responden atau 81,1% mengatakan setuju dan 14 responden atau 18,9% mengatakan sangat setuju karena responden tidak melakukan kesalahan-kesalahan berlanjut ketika mengoperasikan *e-Filing*.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan pegawai tidak melakukan kesalahan-kesalahan berlanjut ketika mengoperasikan *e-Filing*, dengan menggunakan sistem *e-Filing* pegawai dapat melaporkan SPT dengan tepat karena sudah tersistem dengan baik di dalam menu *e-Filing*.

Berdasarkan pernyataan kesembilan terdapat 8 responden atau 10,8% mengatakan tidak setuju dan 11 responden atau 14,9% mengatakan ragu-ragu karena responden tidak mudah berinteraksi dengan sistem *e-Filing* saat melaporkan pajak. Terdapat 45 responden atau 60,8% mengatakan setuju dan 10 responden atau 13,5% mengatakan sangat setuju karena responden mudah berinteraksi dengan sistem *e-Filing* saat melaporkan pajak.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak membutuhkan usaha yang keras untuk dapat berinteraksi dengan *e-Filing*, menggunakan sistem *e-Filing* pegawai dapat melaporkan SPT dengan cepat dan tepat lebih efisien waktu dan biaya. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang ragu-ragu karena belum dapat berinteraksi dengan baik terhadap sistem *e-Filing* saat melaporkan pajak.

Berdasarkan pernyataan kesepuluh terdapat 1 responden atau 1,4% mengatakan ragu-ragu karena merasa *e-Filing* merupakan suatu sistem yang agak rumit. Terdapat 57 responden atau 77% mengatakan setuju dan 16 responden atau 21,6% mengatakan sangat setuju karena dalam mempelajari cara menggunakan *e-Filing* responden tidak merasa *e-Filing* merupakan suatu sistem yang rumit.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menurut pegawai dalam mempelajari cara menggunakan *e-Filing* responden sangat mudah, sistem *e-Filing* merupakan suatu sistem yang mudah dan tidak rumit, karena setiap menu dan kolom sudah jelas untuk pengisian SPT. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang ragu-ragu karena belum ada sosialisasi ke beberapa pegawai, sehingga merasa *e-Filing* merupakan suatu sistem yang rumit.

Berdasarkan pernyataan kesebelas terdapat 1 responden atau 1,4% mengatakan ragu-ragu karena reponden tidak mudah berinteraksi dengan

sistem *e-Filing* saat melaporkan pajak. Terdapat 59 responden atau 79,7% mengatakan setuju dan 14 responden atau 18,9% mengatakan sangat setuju karena responden mudah berinteraksi dengan sistem *e-Filing* saat melaporkan pajak.

Berdasarkan hal tersebut pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan mudah berinteraksi dengan sistem *e-Filing* saat melaporkan pajak. Dengan menggunakan sistem *e-Filing* pegawai dapat mengoperasikannya sesuai dengan kebutuhan pegawai. Berdasarkan wawancara masih adanya responden yang ragu-ragu karena belum dapat berinteraksi dengan baik terhadap sistem *e-Filing* saat melaporkan pajak.

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner kemudahan dalam menerapkan sistem *e-Filling* dari 11 pernyataan dan 74 responden yang menjawab setuju dan sangat setuju sebanyak 758 dari total 814 jadi sebesar 93,12%. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Wajib Pajak (pengguna *e-Filing*), *e-Filing* mudah digunakan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan secara *online* dan *real time*. Kemudahan yang dimaksud adalah bahwa Wajib Pajak tidak merasa sulit dalam menggunakan *e-Filing* pada saat penyampaian SPT. Kemudahan yang dirasakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menggunakan *e-Filling*, sistem mudah dioperasikan sesuai dengan apa yang ingin wajib pajak kerjakan, dikarenakan Wajib Pajak sudah terbiasa menggunakan sistem informasi dan teknologi saat bekerja dan hal

tersebut menjadi salah satu faktor pendukung penerapan *e-Filing*. Terdapat beberapa responden yang belum merasakan kemudahan penggunaan *e-Filing* dikarenakan belum terbiasa menggunakan sistem tersebut dan masih perlu belajar cara menggunakannya dengan terampil sehingga masih belum merasakan penggunaan sistem tersebut lebih mudah.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan sistem *e-filling* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *E-Filling* sudah berjalan dengan cukup baik. Penggunaan *e-Filling* bermanfaat bagi sebanyak 94,47% Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, di tempat kerja Wajib Pajak dapat menambah produktifitas dengan menggunakan waktu luangnya saat bekerja untuk menyampaikan SPT dengan menggunakan *e-Filing*. Hal ini karena di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah menyediakan sistem online sehingga dapat mengakses *e-filling* tersebut. Masih terdapat beberapa responden yang belum merasakan manfaat penggunaan *e-Filling* dikarenakan belum paham dalam menggunakan sistem tersebut sehingga masih dibutuhkan waktu dalam menggunakan sistem tersebut.

Kemudahan dirasakan oleh 93,12% Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menggunakan *e-Filling*, sistem mudah dioperasikan sesuai dengan apa yang ingin wajib pajak kerjakan, dikarenakan Wajib Pajak sudah terbiasa menggunakan sistem informasi dan teknologi saat bekerja dan hal tersebut

menjadi salah satu faktor pendukung penerapan *e-Filing*. Terdapat beberapa responden yang belum merasakan kemudahan menggunakan *e-Filling* dikarenakan belum terbiasa menggunakan sistem tersebut dan masih perlu belajar cara menggunakannya dengan terampil sehingga masih belum merasakan menggunakan system tersebut lebih mudah.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan kepada pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu harus dilakukan sosialisasi ke seluruh pegawai untuk baik yang baru maupun pegawai yang sudah lama agar lebih memahami sistem tersebut. Terlebih kondisi sekarang ini tidak hanya pelaporan pajak, pembayaran pajak pun sudah ada sistem *e-Billing*. Perlu ditingkatkannya sosialisasi atas sistem tersebut akan meningkatkan efektivitas dan produktifitas pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Adminitrasi Pajak Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- Arsyie. 2014. Analisis Penerapan *E-Filing* Dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT XYZ (Studi Kasus Pada PT XYZ). *Jurnal Ilmiah* Vol 2, No 04. Diakses melalui:  
[http://journal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal\\_ilmiah\\_ub/article/view/591/497](http://journal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal_ilmiah_ub/article/view/591/497)
- Dwi dan Fany (2015) Analisis Penerapan Aplikasi *E-Filing* Dalam Melaporkan Spt Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara. *Jurnal Akuntansi*. Diakses melalui: <http://thesis.binus.ac.id/.../2014-2-01504-AK%20WorkingPaper001.pdf>
- Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana.
- Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iqbal Hasan. 2009. *Pokok-pokok Materi Statistik 1*. Cetakan Keenam. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pokok-pokok Materi Statistik 2*. Cetakan Keenam. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Sari. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta. Diakses melalui: <http://eprints.uny.ac.id/19850/1/skripsi%20full.pdf>
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan I*, Salemba Empat, Jakarta.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*, Edisi 2, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Ex. Kanwil Perhubungan Sumatera Selatan  
Jl. Arah Bandara SMB II Palembang Telp. 0711 – 385108, Fax. 0711 - 385107

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

NOMOR : 800 / 0131 / BPPD-SS / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, menerangkan bahwa :

Nama : MELDA NOVITA

NIM : 22.2011.042

Program Studi : Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Palembang

Judul Skripsi : Persepsi Pegawai dalam Menerapkan Sistem E-Filling Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bagi Orang Pribadi yang Bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan riset/penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tanggal 5 Januari 2016 s.d. 5 Maret 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palembang

pada tanggal 07 Februari 2017

a.n. Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH PROVINSI SUMSEL  
SEKRETARIS,



YANA FARDIANA, SE. MM  
NIP. 196111271985031006

DAFTAR NAMA PEGAWAI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	KETERANGAN
01	H. YULIZAR DINOTO, SH	
02	Dr. HERAWATI, MM	
03	H. HASNANDAR SETIAWAN, SE,MM	
04	dr. Hj. ROSDIANA, M.Kes	
05	TANTOWIT, SE, MM	
06	CIKDIN N, SE	
07	Hj. ANNY MURDAYANI, SE, Msi	
08	Dr. ZULFERI AS	
09	H. IRIANSYAH, S.Sos, SKM, M KeS	
10	NURMAITINS.Sos. MM	
11	ERNAWATI	
12	Drs. SYAFRUDDIN	
13	YUNI LUSIDA , SKM	
14	H. SYAIFUDIN, SE	
15	ANSORI, S.Sos	
16	DAHLIA, S.Sos	
17	SUDIRMAN, SPd,M Kes	
18	ERMA SOESILAWATI, S.Psi	
19	MUHAJIRIN, S.Sos	
20	TASMANTO, S.IP	
21	MEGARATI, AMG	
22	YUS AMINAH, S.Ip	
23	TAMIMI, BA	
24	MARIAM ,BSC	
25	RUSMINI, SE, MAP	
26	DINA HANDAYANI, SE	
27	ZUMADI AZ., SKM	
28	HENI ENDRIYANA, SE	
29	Hj. SUARHA DARIBA, SH	
30	NOVIKO DEWI DAMAYANTI	
31	RODIATI	
32	G. SISWA WIRAWAN	
33	SALBIYAH	
34	REBUDIN	
35	RUAIDAH	
36	CHOLDAN EFFENDI	
37	TINA PURBA	
38	DINSIH	
39	AMIRULLATIF	
40	CHRISTINE DAMERIANA. S	
41	dr. INDAH APRILLIA SYAPUTRI	
42	SRI PUSPA WATI	
43	RUSDIANA, SKM	
44	NURMALA SARI, AMG	
45	AFRIANDI KURNIAWAN, SIP	
46	EDDY JUNAIDI, S.ST	
47	MERDAYANA. SKM	

48	YESSI ELISA, SE. M.Si	
49	SYAMSIDAR	
50	ELVIYANA, Am.Keb	
51	NUNIK MULYANINGSIH, S.Kep	
52	MIRHANSA	
53	LESTARI NINGSIH, S.Kep	
54	RAMDIANA, AM.Keb	
55	OKTRIANA VERTASARI, AMG, SPD	
56	UJANG ALNEMA, SKM	
57	SUBAGIO	
58	NUZUAR ULFA, S.Kep	
59	TUTI HERLINA, SKM	
60	SUDIRMAN, SKM	
61	HABSOH, AM.Kep	
62	NERPIANA, S.Kep	
63	RUSMALA DEWI, SH	
64	SARMUDI, S.E	
65	FEBRI HARYADI, S.A.P	
66	DISLAYANI, A.M.Kep	
67	FESY KOWANI, AM.Keb	
68	SRI RAHAYU, AMKep	
69	DEDY EKA PUTRA	
70	DIAN MARGARENI, AM.Keb	
71	NOPRIYADDIN, AMAK	
72	KRISTINA SUSANTI. A.Md	
73	HERMANTO	
74	JEVA RATNA ULY	



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : <b>Melda Novita</b>	PEMBIMBING
NPM : <b>22 2011 042</b>	KETUA : <b>M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si</b>
PROGRAM STUDI : <b>Akuntansi</b>	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : <b>Persepsi Pegawai Dalam Menerapkan Sistem E-Filling Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan)</b>	

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
2/8 - 2016	Bab I Bab II & III			Ace partisi
26/2 2016	Bab II & III Bab IV & V			Ace partisi
1/2 2017	Bab IV & V Bab V			Ace partisi Ace

PERATURAN :  
Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi. 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang  
Pada tanggal : 02 / 02 / 2017

Dekan  
Program Studi :  
  
**Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

*Unggul dan Islami*

# Sertifikat

228/J-10/FEB-UMP/SHA/V/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

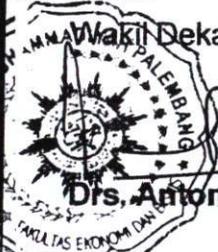
DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : MELDA NOVITA  
NIM : 222011042  
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (26) Surat Juz Amma  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 08 Mei 2015  
an. Dekan

Wakil Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
LABORATORIUM BAHASA

Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 512637

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Melda Novita  
Place/Date of Birth : Belitang, October 20th, 1993  
Test Times Taken : +2  
Test Date : February 18th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension : 52  
Structure Grammar : 41  
Reading Comprehension : 48  
OVERALL SCORE : 470

Palembang, March 5th, 2015

Head of Language Laboratory

Rini Susanti, S.Pd.,M.A

NBM?NIDN. 1164932/0210098402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
STATUS TERAKREDITASI

**PIAGAM**

No.259/H-4/PPKKN/UMP/IX/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

Nama : Melda Novita  
Nomor Pokok Mahasiswa : 22 2011 042  
Fakultas : Ekonomi  
Tempat Tgl. Lahir : Belitang, 20-10-1993

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-7 yang dilaksanakan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 2 September 2014 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Pulau Rajak  
Kecamatan : Betung  
Kota/Kabupaten : Banyuasin  
Dinyatakan : LULUS

Mengetahui  
Rektor,

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

Palembang, 15 September 2014  
Ketua LPKKN,

Ir. Alhanannasir, M.Si.

## **Biodata Penulis**

Nama : Melda Novita

Tempat, tanggal lahir : Belitang, 20 Oktober 1993

Agama : Islam

Hobby : Menyanyi

Alamat : Jl. Papua 04 Blok AB 06 Perumahan OPI Jakabaring Palembang

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul Penelitian : Analisis Penerapan Sistem *E-Filling* Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pembimbing : M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si

Riwayat Pendidikan : SDN 1 Campang Tiga lulus tahun 2005  
SMPN 1 Cempaka lulus tahun 2008  
SMAN 1 Cempaka lulus tahun 2011  
Univ. Muhammadiyah Palembang lulus tahun 2017

Palembang, 2017

Melda Novita

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUSI : FAKULTAS ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI : PERKULIAHAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI : PERKULIAHAN ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI : PERKULIAHAN ILMU HUKUM

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /P/II / 2014 (B)  
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/II / 2014 (B)  
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XIII / 2015 (B)  
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/D.I-III/VII / 2015 (B)

Email : febumplg@umpalembang.ac.id

Jalan Jendral Sudirman No. 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Februari 2017  
Waktu : 13.00-17.00  
Nama : Melda Novita  
NIM : 22 2011 042  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Skripsi : Perpajakan  
Judul : ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si	Pembimbing	24/2-2017	
2	Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	25/Maret 2017	
3	Mizan, S.E., Ak., M.Si., CA	Penguji I	23-3-2017	
4	Welly, S.E., M.Si	Penguji II	17-3-2017	

Palembang, Maret 2017

Mengetahui

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIDN/NBM : 0269101502/944806